



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA : BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ASHARI SYARIEF**
2. Jabatan : **KUASA PENGGUNA ANGGARAN**
3. NHK : **196829**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 2.095.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 148 m2/54 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 80 m2/50 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/40 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
4. Tanah Seluas 900 m2 di KAB / KOTA KAMPAR, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
5. Tanah Seluas 17.300 m2 di KAB / KOTA SIAK, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
6. Tanah Seluas 1.530 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000
7. Tanah Seluas 367 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 5.000.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 355.825.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 19.596.738

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 2.475.421.738

III. HUTANG

Rp. 89.979.414

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.385.442.324

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.